



NOTA KESEPAHAMAN

Antara

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL

dan

**ORGANISASI PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KOTA TUAL**

Tentang

PELAKSANAAN PROGRAM DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2021 DI KOTA TUAL

NOMOR : 08/PR.07-MoU/8172/KPU-KT/VII/2021
NOMOR : 12/SKR/PKK-KT/VIII/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Kantor PKK Kota Tual, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **IBRAHIM FAQIH** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tual, berkedudukan di Jalan Baru KPU, Dusun Mangon Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Tual, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ny. WA MUHIA RAHAYAAN** : Ketua TP PKK Kota Tual, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 UN Kota Tual. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Tual, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai mana berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri yang tugasnya melaksanakan Pemilihan Umum di tingkat Kota Tual secara hierarki.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Kota Tual yang selanjutnya disingkat PKK merupakan suatu gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Selanjutnya gerakan PKK Kota Tual merupakan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah Kota Tual yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan masing-masing **PARA PIHAK** setuju dan sepakat melaksanakan Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan/ memfasilitasi pembentukan Desa/ Kelurahan Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah :
 - a. Membangun kesadaran politik masyarakat agar menjadi pemilih yang berdaulat;
 - b. Mengedukasi masyarakat dalam memfilter informasi, sehingga masyarakat tidak mudah termakan isu hoaks terkait kepemiluan;
 - c. Menghindarkan masyarakat pada praktek politik uang yang sering terjadi menjelang Pemilu dan Pemilihan;
 - d. Meningkatkan kapasitas dan kualitas partisipasi pemilih, terlebih khusus pemilih perempuan;
 - e. Membentuk kader yang mampu menjadi penggerak dan penggugah kesadaran politik masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan akses yang seluas - luasnya terkait pelaksanaan program Desa/ Kelurahan Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota kepada **PIHAK KEDUA**;
2. **PIHAK KEDUA** berkomunikasi, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan **PIHAK PERTAMA** untuk berkomitmen memfasilitasi menciptakan Kader Perempuan Sadar Pemilu di lokasi Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan akses dan fasilitas yang seluas-luasnya terkait pelaksanaan program Desa/ Kelurahan Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota di wilayah **PIHAK KEDUA**;
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan pemahaman, bimbingan teknis maupun sosialisasi dalam pelaksanaan program Desa/ Kelurahan Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota di wilayah **PIHAK KEDUA**;
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memfasilitasi/ membantu rekrutmen peserta Desa/ Kelurahan Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota yang berasal dari warga masyarakat di wilayah **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jumlah basis (Basis Perempuan, Basis Keluarga, Penggerak PKK, Kader Posyandu, Dasawisma).

Pasal 4 PELAKSANAAN

Metode Pelaksanaan Kegiatan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan diliaksanakan dengan metode langsung tatap muka maupun tidak langsung yaitu :

1. Metode tatap muka (*luring*)
 - a. Kunjungan Desa Sadar Pemilu dan Pemilihan
 - b. Ceramah
 - c. Diskusi Kelompok atau Diskusi Terfokus
 - d. Simulasi Bermain Peran

2. Metode tidak langsung (*daring*)
 - a. Webinar
 - b. TOT (*Short Course*)
 - c. Pemutaran Film Pendek
 - d. Sapa Pemilih Perempuan lewat *video call*

Pasal 5 PEMBIAYAAN

1. Biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK**.
2. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu hingga pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman.
2. Apabila Nota Kesepahaman ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir atau diakhiri.
3. Apabila selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir jangka waktu Nota Kesepahaman ini tidak ada surat pemberitahuan **PARA PIHAK** untuk memperpanjang jangka waktu, maka Nota Kesepahaman ini secara otomatis akan berakhir.

Pasal 7 LAIN - LAIN

1. Bahwa **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini harus mengacu dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Segala perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dapat melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan program mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.

Pasal 8
PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dapat diubah dan/ atau ditambah setiap waktu atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.
2. Segala perubahan dan/ atau tambahan berkenaan dengan isi dan maksud Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK, dan akan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Tual pada hari, tanggal, bulan dan tahun di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup. Masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

